50 PT Ikut Reformulasi GBH

JOGJA--Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggandeng 50 perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk mereformulasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga Indonesia nantinya akan kembali memberlakukan GBHN dalam perencanaan pembangunannya.

"Kami melibatkan perguruan tinggu untuk mereformulasi gbhn yang berisi komprehensif tentang pembangunan jangka pendek dan panjang yang berisi tentang politik, sosial, budaya, dan karakter bangsa," ungkap Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan disela Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN" di Hotel Sheraton, Jumat (15/4).

Reformulasi tersebut menjadi satu hal yang penting dilakukan saat ini. Sebab Indonesia semakin dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks seperti kesenjangan sosial, wawasan kebangsaan yang mulai pudar, identitas ke-Indonesiaan mulai luntur dan masyarakat yang kurang peduli Pancasila menjadikan negeri ini memerlukan sebuah perubahan baru.

Para akademisi di PT dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan tersebut melalui diskusi bersama. Hal itu dilakukan karena fraksi-fraksi politik tidak mendiskusikan isi GBHN.

Selain akademisi, ahli-ahli hukum tata negara, masyarakat luar dan rakyat juga dilibatkan. Dengan dekikian akan menghasilkan keputusan yang lebih mendalam.

"Dari diskusi bisa terjawab apakah MPR perlu diberi wewenang membuat gbhn, seperti apa, Apa produk hukum bila gbhn ada dan lembaga mana yang memiliki wewenang," ungkapnya.

Sementara peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengungkapkan, pemerintah harus memperhatikan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sebelum mereformulasi GBHN. Hal itu diperlukan karena Indonesia saat ini mengusung sistem pemerintahan presidensil dan bukan parlementer.

"Sedangkan dengan menggunakan sistem GBHN yang dibuat oleh MPR, maka secara tidak langsung sistem pemerintahan kita beralih ke parlementer. Dan itu tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil," tandasnya.

Zainal menambahkan, pihak-pihak yang akan membuat GBHN juga harus dipastikan. Apabila yang melakukannyaa presiden, maka otomatis dalam GBHN tersebut harus diperhatikan program jangka pendeknya, yakni selama masa 5 tahun presiden menjabat.

"Karena untuk perumusan jangka panjang, Undang-Undang Dasar sudah merumuskan target pembangunan nasional sendiri," ungkapnya.

Namun jika parlemen yang membuat GBHN, lanjutnya maka akan memiliki implikasi kepada sistem presidensil di Indonesia. Apabila presiden dijatuhkan parlemen karena tidak menjalankan GBHN, berarti sistemnya parlementer. Karena dengan sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab ke parlemen, tetapi langsung ke publik.

"Intinya kembali ke sistem pemerintahan negeri ini. Kalau sistem presidensil, jangan hadirkan GBHN, tetapi hadirkan Undang-Undang pembangunan jangka panjang. Tapi kalau negara ini bersepakat menjadi negara semi presidensil atau parlementer, ayo kembali saja. Tetapi konsekuensinya presiden kembali dipilih oleh parlemen," imbuhnya. **(ptu/age)**

PAPARKAN -- Ketua MPR RI, Zulkifli paparannya terkait Reformulasi GBHN Sheraton, Jumat (15/4).